



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GERINDRA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAGUS SUSETYO**
2. Jabatan : **KETUA FRAKSI**
3. NHK : **536531**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.185.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 417 m²/120 m² di KAB / KOTA PETAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 15046 m² di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
3. Tanah Seluas 11615 m² di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.430.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/180 m² di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
5. Tanah Seluas 130 m² di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 387 m²/387 m² di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m²/73 m² di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 847.000.000

1. MOTOR, HONDA NF11CIC M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 11CIC M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



3. MOBIL, HONDA FRED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	117.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	125.000.000
Sub Total	Rp.	8.274.000.000
III. HUTANG	Rp.	39.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.235.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.